



## RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2022







BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan pada Tahun 2021;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);

28. Peraturan ...



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);



36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor );
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

44. Peraturan ...



44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
46. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (dua puluh) tahun
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.



11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.



26. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
27. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi, penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Kedudukan RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah yang memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan untuk kurun waktu satu tahun.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I     Pendahuluan;
- b. BAB II    Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III   Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV    Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V     Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI    Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. BAB VII   Penutup.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Juli 2021



BUPATI SUMEDANG,

*[Signature]*  
DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Juli 2021



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

*[Signature]*  
HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 71





PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Prabu GajahAgung No. 9 Telp. (0261) 201775, FAX. (0261) 201775 Kodepos  
45323  
SUMEDANG

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 800/Kep.Q05/BPKAD/2021  
LAMPIRAN : 13 (tiga belas) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PERENCANAAN,  
PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
- c. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, maka diperlukan perubahan Anggota Tim Pelaksana Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 990/Kep. /BPKAD/2021 tentang Penunjukan Unsur Pengelola Kegiatan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai tugas yaitu:

**Ketua :**

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD, Menyusun DPA-SKPD dan menyusun RKA-SKPD.
- c. Mengesahkan dan menandatangani Renja dan Renja Perubahan SKPD;
- d. Mengendalikan Rapat Pra Forum dan Forum SKPD.
- e. Memeriksa LAKIP , LPPD , LKPJ Laporan Capaian Kinerja , SPIP dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

**Sekretaris :**

- a. Memverifikasi RKA , DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Memverifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD;
- c. Memimpin diskusi Pra Forum dan Forum SKPD.
- d. Membuat Konsep LAKIP , LPPD , LKPJ Laporan Capaian Kerja, SPIP dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

**Anggota :**

- a. Menyusun RKA, DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Menyusun Renja dan Renja Perubahan SKPD;
- c. Membuat konsep paparan Kepala Badan;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan data Pra Forum dan Forum SKPD;
- e. Membantu Membuat konsep LAKIP , LPPD , LKPJ Laporan Capaian Kinerja, SPIP dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- f. Menyusun laporan hasil Kegiatan

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Penyesuaian Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2021

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG, /.



Ir. INE INAJAH, MSE, M.Sc

LAMPIRAN IV : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.  
 NOMOR : 800/Kep. /BPKAD/2021.  
 TANGGAL : 11 Januari 2021  
 TENTANG : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Penyusunan Renja SKPD.

No.	N A M A	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Ir. INE INAJAH, MSE, M.Sc	19690315 199901 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua
2.	SONDJAJA, S.Sos, MM	19711214 199503 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris
3.	MIA ROHMLATIN. S, S.STP, M.Si	19855060 200412 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Anggota
4.	SUSANTI, SE, M.Si	19721219 199703 2 004	Pembina (IV/a)	Anggota
5.	Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH, M.Si	19690820 198903 2 003	Pembina (IV/a)	Anggota
6.	Drs. H. DADANG RUKMAWAN, M.Kes	19630301 198302 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)	Anggota
7.	Dra. Hj. KUMALA HERMAWATI	19650405 199403 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
8.	SARI AYU DIANTINI, SE, MM	19820510 200902 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
9.	TUTI HERMAWATI, SE	19751005 200701 2 011	Penata (III/c)	Anggota
10.	IDRIS DARWANTO, SM	-	-	Anggota
11.	REGINA WIDYA UTAMI, SE, MM	-	-	Anggota
12.	JAJANG WIJANA, SE	-	-	Anggota
13.	RAGIL DWIGUNA, S.Kom	-	-	Anggota
14.	RITA YULIAN	-	-	Anggota
15.	DEBBY. A YUKORURI, SE	-	-	Anggota
16.	ANIS SAJIDIN, SE	-	-	Anggota
17.	BUDI SULISTIA, SE	-	-	Anggota

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN SUMEDANG,



Ir. INE INAJAH, MSE, M.Sc



FORMAT PENGENDALIAN  
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

PERANGKAT DAERAH : **BPKAD**

NO	URAIAN	POKOK-POKOK MATERI	KESESUAIAN		CATATAN
			ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			✓	lampirkan sk Tim
2	Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :	Pedoman Lampiran C.5 Hal 400 (Permendagri 86 Th. 2017)			
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>					
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja	✓		ditambah beberapa
	1.2. Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang			ditambahkan
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari			
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja			
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN SEMESTER</b>					
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (disajikan dalam Tabel 2.1)	a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	}		ditambahkan target tercapai
		b. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	}		di target tidak tercapai
		c. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	✓		disampaikan di
		d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;			alasan
		e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan			
		f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.			
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan	✓		dibahas
	2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;	}		dari struktur organisasi
		b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;	}		tidak ada di
		c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)	✓		terhadap negosiasi pelayanan kecam
		d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan			umum
		e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.			
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RPKD Tahun 2022, (disajikan dalam Tabel 2.3)	a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RPKD dengan hasil analisis kebutuhan;	}	✓	
		b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;	}		
		c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RPKD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RPKD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran nya berbeda	}		
	2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Masyarakat, (Hasil Musrenbang, meliputi usulan PIK, PIPD, Kopercam dll) disajikan dalam Tabel 2.4	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;	}	✓	untuk rencana
		Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan			
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>					
	3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas	✓		ditambahkan
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat				di kegiatan
	3.3. Program, Kegiatan dan sub kegiatan	a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian SDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian NSPK dan SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, dan g. Deh.	}		Program, kegiatan yg terdapat di lingkungan
		b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Jumlah program dan jumlah kegiatan, antara lain meliputi: • Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). • Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya	}	✓	di proyeksi dan di
		c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RPKD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya			untuk rencana

NO	URAIAN	POKOK-POKOK MATERI	KESESUAIAN		CATATAN
			ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6
	BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022				
	BAB V : PENUTUP	a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut, pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.			
3	TABEL - TABEL				
	Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020	ditandatangani Kepala Perangkat Daerah	✓		Seharusnya matanya
	Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....		✓		
	Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022		✓		
	Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan sub kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022		✓		
	Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Sumedang	Format sesuai hasil Cetak Renja dalam SIPD			Unit di hpd → Program Kes mta sub kes mta
	Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022	Format sesuai hasil Cetak RKPD dalam SIPD			

TIM VERIFIKASI

*[Signature]*  
LARRY H



Formulir E.70  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022  
Kabupaten Sumedang

Perangkat Daerah : BPKAD

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.		✓		dilaksanakan
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	✓			mpn balun selanjutnya
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah	✓			di penuhi.
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPД Kabupaten Sumedang Tahun 2021	✓			penelaah / informasi tidak di penuhi.
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.		✓		
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah	✓			dilaksanakan kegiatan tidak dilampi kaiti
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati Sumedang.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 yang telah disahkan.				

Sumedang, .....2022

Kepala .....  
Kabupaten Sumedang,

.....  
.....  
NIP.....

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya pula kami dapat menyusun Dokumen Rencana Awal Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022. Sehubungan hal tersebut penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2020.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga target capaian yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai harapan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin.

Sumedang, Agustus 2021  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Kepala,



**IR. SWEINAJAH., MSE., M.Sc**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19690315 199901 2 001



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2019 s.d 2020 Kabupaten Sumedang .....	15
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah .....	27
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 .....	44
Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional Kabupaten Sumedang .....	41
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Sumedang .....	46
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kab. Sumedang .....	58
Tabel 4.1. Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....	70
Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang .	79

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang sebelumnya bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, berubah namanya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja BPKAD
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja BPKAD
  - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Penyusunan Rancangan Renja BPKAD
  - Pengolahan data dan informasi
  - Analisis gambaran pelayanan BPKAD
  - Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2018
  - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD
  - Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
  - Perumusan tujuan dan sasaran
  - Telaahan usulan program dan kegiatan
  - Perumusan kegiatan prioritas
  - Penyajian awal dokumen rancangan Renja BPKAD
  - Penyempurnaan rancangan Renja BPKAD
  - Pembahasan forum SKPD
  - Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan
- c. Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD bertujuan untuk :

  - Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD
  - Menyelaraskan program dan kegiatan dengan SKPD lain dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah



- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif BPKAD Tahun Anggaran 2022
- d. Penyusunan dan Penetapan Renja BPKAD Tahun 2022
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2022
  - Asistensi dan Verifikasi Dokumen Renja
  - Pengesahan oleh Kepala Daerah
  - Penetapan Renja oleh Kepala BPKAD

Rencana Kerja BPKAD Tahun 2022 memuat mengenai rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang disusun berdasarkan acuan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018-2023 serta RKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022, khususnya dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2022 pun didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan Renja ini pun memiliki kesesuaian dengan Renstra Kementerian Keuangan yaitu dalam hal mendorong efektifitas tata kelola keuangan dan penguatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan.

Dokumen Renja yang disusun merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan-peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
  32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);
  33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012



- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
  36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
  39. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puser Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);
  40. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);
  41. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 71);
  42. Keputusan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1.3.1. Maksud

1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Sebagai Indikator Kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang 5 (lima) Tahun kedepan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang.
4. Diketuinya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling tali-temali, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat di tingkat bawah dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang visi dan misi Badan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman terhadap Badan.



10. Memudahkan pejabat/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

*Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja BPKAD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, Renstra Kementerian Keuangan serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.*

#### **1.2. Landasan Hukum**

*Memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya tentang SOTK dan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.*

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

*Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Tahun 2022.*

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

*Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD Tahun 2022 serta susunan garis besar isi dokumen.*

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2018**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023**

*Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKAD 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BPKAD tahun-tahun sebelumnya.*

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Sumedang  
*Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPKAD berdasarkan Indikator RPJMD dan Indikator Rencana Program SKPD dalam RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPKAD*
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Sumedang  
*Berisikan mengenai:*
  - a. *Tingkat kinerja pelayanan BPKAD*
  - b. *Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD*
  - c. *Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023*
  - d. *Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKAD*
  - e. *Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022*
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
*Membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan*
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022  
*Menjelaskan tentang kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKAD*

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat  
*Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD*
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2022  
*Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD*



3.3. Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2022

1. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
  - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 4.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 4.2 Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2022, selain mengacu pada Renstra BPKAD, juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD pada Tahun 2019, karena hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan BPKAD pada tahun-tahun mendatang.

**Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2016 tentang BPKA berganti nama menjadi BPKAD.**

Adapun tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, salah satu indikator yang menjadi ukuran tingkat kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari tertibnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara berturut-turut pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 dan Penetapan APBD Tepat Waktu yang telah diraih secara berturut-turut pada Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Target kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 realisasi tahun 2020 adalah WTP maka capaian kinerja sebesar 100%. Dalam Pencapaiannya WTP tidak serta merta dengan mudah, akan tetapi banyak permasalahan yang dihadapi dalam menyusun LKPD berbasis akual adalah sistem informasi, keterbatasan SDM komitmen stakeholder, kompleksitas transaksi, audit oleh BPK RI, keterbatasan waktu. Solusi dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut adalah dengan cara :



- a. Regulasi dan kelembagaan
  - Menyempurnakan peraturan yang ada
  - Menyempurnakan SOP
  - Membuat daftar masalah dan solusinya (MR)
  - Memastikan semua transaksi ada dasar hukumnya
- b. Sumber daya manusia
  - Peningkatan komitmen jajaran pimpinan daerah dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis akrual
  - Penguatan nilai" organisasi dengan fakta intergitas
  - Sosialisasi dan pelatihan akuntansi dan peneglolaan barang milik daerah
  - Melakukan bimbingan langsung dalam penyelesaian masalah helpdesk
- c. Teknologi informasi
  - Menyediakan sarana dan prasarana teknologi pendukung informasi
  - Kordinasi dengan pembuat aplikasi SIPKD dan SIMDA
- d. Sistem pengendalian internal
  - Peningkatan peran inspektorat daerah dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review LK
  - Menyempurnakan sistem pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggung jawaban
  - Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal maupun external
- e. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
  - Membuat time prime serta target penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
  - Melakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan LKPD
  - Melakukan kordinasi dan komunikasi dengan auditor untuk memastikan tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan
- f. Sinergi antar stakeholder
  - Sinergi yang bagus antara pemerintah daerah pemerintah pusat, APIP, pemeriksa laporan keuangan dan dewan

Target kinerja Penetapan APBD tahun 2020 adalah Tepat Waktu realisasi tahun 2020 adalah Tepat Waktu maka capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Desember 2020 dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Desember 2020. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu:

1. Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang *Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah* dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang *Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah* menjadi kendala dalam penyusunan APBD T.A. 2021, dikarenakan setiap SKPD diharuskan melakukan pemetaan dan pemutakhiran program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam masing-masing Dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2021
2. Penggunaan aplikasi SIPD untuk penganggaran Tahun 2021 menjadi kendala dalam penyusunan RKA SKPD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD T.A. 2021, karena aplikasi SIPD merupakan aplikasi baru yang harus diimplementasikan untuk penganggaran Tahun 2021, sehingga diperlukan Sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh SKPD terkait penggunaan aplikasi ini

Adapun solusi dalam menghadapi kendala tersebut adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan BAPPPEDA yang merupakan leading sector perencanaan daerah dalam melakukan pemetaan dan pemutakhiran program dan kegiatan, karena proses perencanaan merupakan dasar dalam melakukan proses penganggaran.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kemendagri terkait implementasi penggunaan aplikasi SIPD.
3. Melakukan Sosialisasi dan FGD serta pendampingan kepada seluruh SKPD mengenai penggunaan aplikasi SIPD, sehingga dapat diketahui berbagai kendala di lapangan terkait penggunaan aplikasi ini.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 yang disajikan pada tabel berikut :



**Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2020	Capaian RPJMD Target Tahun 2020	Rata-rata Capaian Indikator
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	100
	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
<b>CAPAIAN TAHUN 2020</b>						<b>100</b>

Adapun capaian pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 2019 s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Sumedang**

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>TAHUN 2018-2019</b>										
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah								
	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	20	4	4	4	100	4	12	60,00
	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	20	4	4	4	100	4	12	60,00
	Sinegritas Perencanaan Penyusunan Anggaran	Jumlah Tim Verifikator	20	4	4	4	100	4	12	60
	Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	10	2	2	2	100	2	6	60
	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	56	56	56	100	56	168	60
	Penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	10	1	1	1	100	1	3	0
	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	10	1	1	1	100	1	3	30
	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	56	56	56	100	56	168	60



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	10	2	2	2	100	2	6	60
	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	56	56	56	100	56	168	60,00
	Asistensi DPPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	56	56	56	100	56	168	60
	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	15	3	3	3	100	3	9	60
	Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	Buku Saku Murni dan Perubahan	10	2	2	2	100	2	6	60
	Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	280	56	56	56	100	56	168	60
	Peningkatan Kapasitas TAPD	Jumlah TAPD	20	0	0	0	0	0	0	0
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	10	2	2	2	100	2	6	60
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	5	1	1	1	100	1	3	60
	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	20	2	2	2	100	2	6	30
	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	280	56	56	56	100	56	168	60
	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	5	1	1	1	100	1	3	60
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	56	0	56	56	100	0	56	100,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	224	0	0	0	0	0	0	0
	Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengesahan	3360	0	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	5	1	1	1	100	1	3	60,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2019			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	1	1	1	0	1	3	60
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	1	1	1	100	1	3	60,00
	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrua	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	5	1	1	1	100	1	3	60,00
	Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	280	56	56	56	100	56	168	60,00
	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Jumlah Dokumen LRA	120	24	24	24	100	24	72	60,00
	Penyusunan RKBMD dan RKPMD	Jumlah SKPD yang dikelola	10	2	2	2	100	2	6	60,00
	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	1	3	60,00
	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	280	56	56	56	100	56	168	60
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	280	56	56	56	100	56	168	60
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	5	1	1	1	100	1	3	60
	Identifikasi Belanja Modal SKPD	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	5	1	1	1	100	1	3	60
	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	5	1	1	1	100	1	3	60
	Inventarisasi Aset	Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	4	0	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	4	0	0	0	0	0	0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>TAHUN 2019- 2020</b>										
	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah								
	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	20	8	4	4	100	4	16	80,00
	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	20	8	4	4	100	4	16	80,00
	Sinegritas Perencanaan Penyusunan Anggaran	Jumlah Tim Verifikator	20	8	4	4	100	4	16	80
	Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	10	4	2	2	100	2	8	80
	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	112	56	56	100	56	224	80
	Penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	10	4	1	1	100	1	6	0
	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	10	4	1	1	100	1	6	60
	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	112	56	56	100	56	224	80
	Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	10	4	2	2	100	2	8	80
	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	112	56	56	100	56	224	80,00
	Asistensi DPPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	280	112	56	56	100	56	224	80
	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	15	6	3	3	100	3	12	80
	Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	Buku Saku Murni dan Perubahan	10	4	2	2	100	2	8	80



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	280	112	56	56	100	56	224	80
	Peningkatan Kapasitas TAPD	Jumlah TAPD	20	0	0	0	0	0	0	0
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	10	4	2	2	100	2	8	80
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	5	1	1	1	100	1	3	60
	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	20	2	2	2	100	2	6	30
	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	280	112	56	56	100	56	224	80
	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	5	2	1	1	100	1	4	80
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	56	56	0	0	0	0	56	100,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	224	0	56	56	100	56	112	50
	Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengesahan	3360	0	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	5	2	1	1	100	1	4	80,00
	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	2	1	1	0	1	4	80
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	2	1	1	100	1	4	80,00
	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrua	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	5	2	1	1	100	1	4	80,00
	Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	280	112	56	56	100	56	224	80,00
	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Jumlah Dokumen LRA	120	48	24	24	100	24	96	80,00
	Penyusunan RKBMD dan RKPMD	Jumlah SKPD yang dikelola	10	4	2	2	100	2	8	80,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2020			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	5	2	1	1	100	1	4	80,00
	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	280	112	56	56	100	56	224	80
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	280	112	56	56	100	56	224	80
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	5	2	1	1	100	1	4	80
	Identifikasi Belanja Modal SKPD	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	5	2	1	1	100	1	4	80
	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	5	2	1	1	100	1	4	80
	Inventarisasi Aset	Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	4	0	1	1	100	0	1	25
	Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	4	0	1	1	100	0	1	25
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10=(5+7+9)</i>	<i>11=(10/4)</i>
<b>TAHUN 2021-2023</b>										
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>									
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	10	4	2	2	100	2	8	80
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10	4	2	2	100	2	8	80
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Validasi RKA SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Validasi DPA SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD	10	4	2	2	100	2	8	80
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	30	12	6	6	100	6	24	80
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	20	8	4	4	100	4	16	80
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	3	0	1	1	100	1	2	67
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	3	0	1	1	100	1	2	67
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan	3	0	1	1	100	1	2	67
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	3	0	0	0	0	1	1	33
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>									
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6	0	2	2	100	2	4	67
	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Validasi RAK Murni dan Perubahan, Jumlah prakiraan pengeluaran kas daerah dan jumlah penerbitan SPD	6	0	2	2	100	2	4	67
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi Laporan Konfirmasi Transfer /rekonsiliasi dana spesifik dan penyaluran dana spesifik (DAU)	9		3	3	100	3	6	67
	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai	3		1	1	100	1	2	67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6		2	2	100	2	4	67
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	3		1	1	100	1	2	67
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan	3		1	1	100	1	2	67
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>									
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Register Penerimaan dan Register Pengeluaran	6		2	2	100	2	4	67
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	9		3	3	100	3	6	67
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3		1	1	100	1	2	67
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	12		4	4	100	4	8	67
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda LPP APBD dan Perbub LPP APBD	12		4	4	100	4	8	67
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Tindak lanjut BPK	4		1	1	100	1	2	50
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR	2		1	1	100	1	2	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Pemda	3		1	1	100	1	2	67
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagan Akun Standar	6		2	2	100	2	4	67
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Sisdur Akuntansi	3		1	1	100	1	2	67
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	3		1	1	100	1	2	67
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD	2		0	0	0	1	1	50
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	6		2	2	100	2	4	67
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>									
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan	6		2	2	100	2	4	67
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak	6		2	2	100	2	4	67
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dana Bagi hasil	12		4	4	100	4	8	67
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>									
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Jumlah Coustum dalam Sistem Keuangan	3		0	0	0	0	0	0
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>									
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>									
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah SSH	3		1	2	200	1	3	100
	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Jumlah Standar Barang Kebutuhan Barang Milik Daerah	6		2	2	100	2	4	67
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBMMD	6		2	2	100	2	4	67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12		4	4	100	4	8	67
	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	12		4	4	100	4	8	67
	Inventarisasi barang Milik daerah	Jumlah Inventarisasi BMD	6		2	2	100	2	4	67
	Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah BMD yang diamankan	3		1	1	100	1	2	67
	penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BA Penilaian BMD	6		2	2	100	2	4	67
	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan BMD	3		1	1	100	1	2	67
	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	9		3	3	100	3	6	67
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	3		1	1	100	1	2	67
	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Jumlah Penetapan Status pengguna barang	3		1	1	100	1	2	67
	pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD	3		1	1	100	1	2	67

Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

#### Capaian Kinerja Terhadap Indikator RPJMD Tahun 2020

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
3.	Nilai Sakip	BB	BB	100
4.	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	96.25%	91,17%	94.72
5.	Jumlah Inovasi	1	1	100
6.	Indeks Pembangunan Zona Integrasi/ Reformasi Birokrasi	70%	56,167%	80.22

Adapun Capaian Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

#### Capaian Indikator Rencana Program SKPD

Urusan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahun Renstra	Capaian Kinerja Program Tahun 2020	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran (jumlah DPA yang Tidak bermasalah)	Persen	93	96,16	103
	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	100	100
	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	92	99,07	107
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian LK OPD	Persen	90	100	111
	Keakuratan Penatausahaan Aset (materialitas)	Persen	88	97,03	110



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD harus menjadi koordinator bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sehingga tercipta tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang diinginkan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, maka perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD, agar kualitas pelayanan semakin baik. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Capaian					Realisasi Capaian					Proyeksi
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	WTP
2	Penetapan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip			B	BB	A	A	AA	B	BB	-	-	-	A
4	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah			96,15	96,25	96,50	97	97,10	93,73	91,17	-	-	-	97
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1
6	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi			65	70	75	80	85	68,88	57,16	-	-	-	80



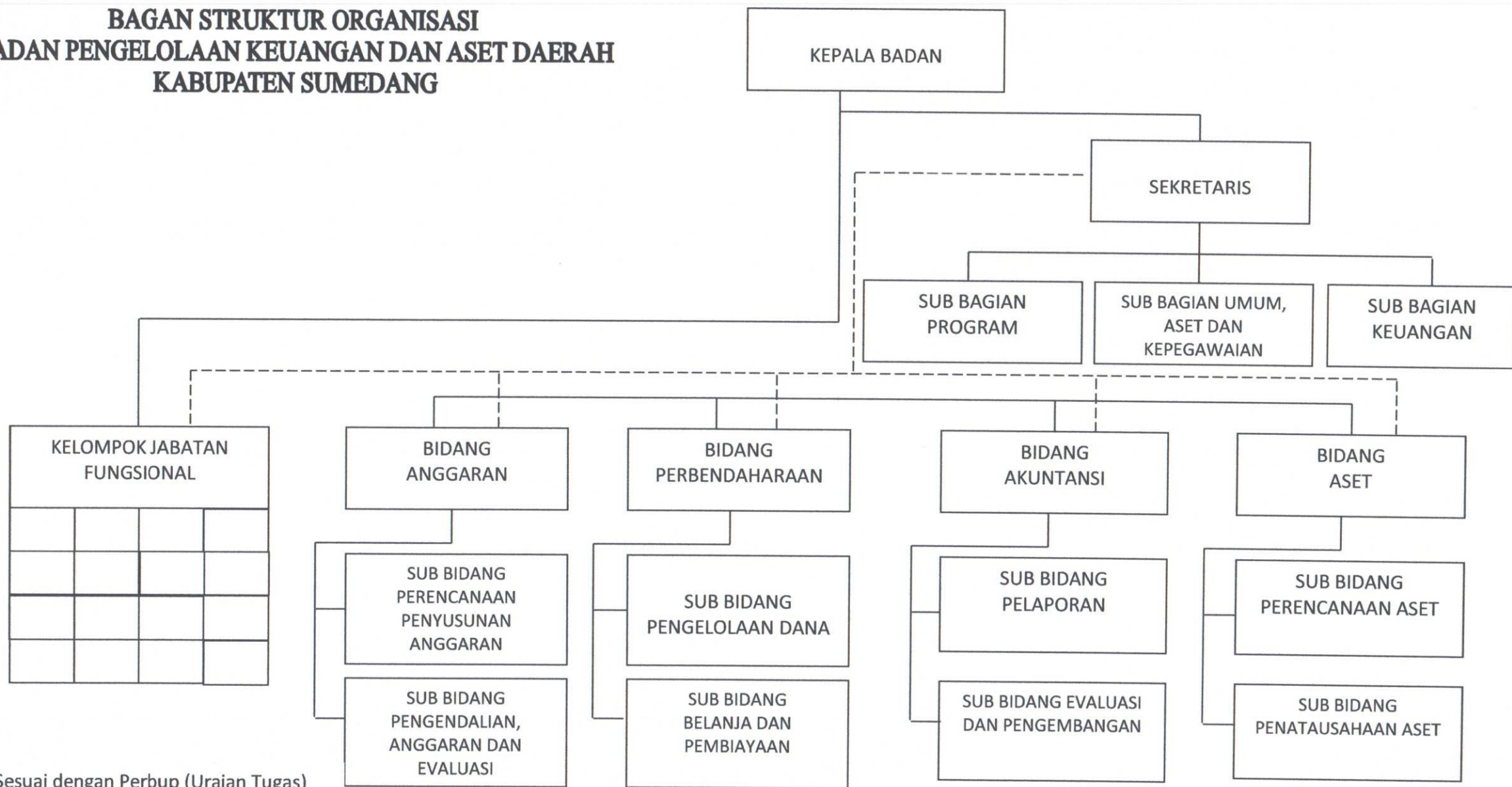
### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**



Sesuai dengan Perbup (Uraian Tugas)  
No. 26 Tahun 2016



Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, dibantu oleh:
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
  2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.
- d. Bidang Perbendaharaan, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
  2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
- e. Bidang Akuntansi, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Pelaporan;
  2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.
- f. Bidang Aset, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Perencanaan Aset
  2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Setiap jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- i. menyusun sistem informasi;
- j. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :

## **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian badan;
- b. menetapkan kebijakan perencanaan dan pengendalian operasional pengelolaan keuangan dan aset;
- c. menetapkan sasaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. mengendalikan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;



- b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
- c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
- d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- e. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
- f. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
- g. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- h. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
- i. merumuskan dan mengkaji sistem informasi badan;
- j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan;
- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan/rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
- l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

### **3. Bidang Anggaran**

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja di bidang anggaran;
- b. mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
- c. mengendalikan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- e. merumuskan dan mengendalikan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. merumuskan dan mengkaji kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah ;
- g. merumuskan dan mengkaji pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- h. merumuskan dana transfer desa; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

#### **4. Bidang Perbendaharaan**

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
- b. merumuskan rancangan/draft SPD;
- c. merumuskan penerbitan/ penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM SKPD;
- e. mengendalikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengendalikan penyimpanan uang daerah;
- g. mengendalikan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
- h. mengendalikan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. mengendalikan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. mengendalikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. mengendalikan penagihan piutang daerah;



- l. merumuskan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
- m. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
- n. mengendalikan dan melaporkan dana transfer;
- o. fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan
- b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

#### **5. Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;
- b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
- c. merumuskan dan mengkaji kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. merumuskan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
- e. merumuskan dan mengendalikan pelaporan, evaluasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- f. merumuskan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa;
- g. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- h. merumuskan dan mengkaji pengolahan data pengelolaan keuangan daerah;
- i. merumuskan dan mengkaji laporan keuangan daerah;
- j. merumuskan penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;

- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Pelaporan; dan
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

## **6. Bidang Aset**

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. merumuskan status penggunaan atas belanja modal/barang milik daerah;
- c. melaksanakan kajian/telaahan teknis terhadap rencana pemanfaatan barang milik daerah atas obyek Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
- d. meneliti/menalaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap barang milik daerah;
- e. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan barang milik daerah yang sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- f. meneliti dokumen-dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan tukar-menukar;
- g. meneliti data administrasi terhadap barang milik daerah yang akan dihibahkan;
- h. meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dan pemerintah daerah;
- i. melaksanakan pengkajian dan penelitian data barang milik daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
- j. meneliti dokumen-dokumen kelengkapan administratif terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan;



- k. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap barang milik daerah;
- l. meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik barang milik daerah berupa rumah Negara;
- m. merumuskan laporan barang milik daerah;
- n. merumuskan barang milik daerah terhadap tuntutan ganti rugi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Aset
- b. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya dalam upaya memenuhi target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah selama Tahun 2017 masih mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

1. Dengan seringnya terjadi perubahan sistem dan aturan pengelolaan keuangan dan aset serta terkadang adanya perubahan petugas pengelola keuangan dan aset SKPD, sehingga kompetensi SDM yang baru masih kurang optimal;
2. Struktur APBD belum ideal;
3. Implementasi Akuntansi berbasis Akrual belum optimal;
4. Penatausahaan aset daerah belum optimal

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.

4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

### **Analisis Lingkungan Internal**

#### **1. Kekuatan (Strengths)**

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;  
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;  
Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;  
Dengan jumlah kekuatan personil sebanyak 74 orang telah dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.
4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;  
Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai merupakan modal dasar yang potensial dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama seluruh stakeholder.
5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BPKAD.  
Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Kelemahan (weakness)**

1. Kualitas SDM masih belum memadai;  
Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional.



2. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;  
Fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.  
Sistem Aplikasi SIPKD dan SIMDA BMD masih belum terintegrasi sehingga masih terdapat ketidaksesuaian.

### **Analisis Lingkungan Eksternal**

#### *a. Peluang (Opportunities)*

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.  
Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah;  
Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh SKPD sebagai perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar.
2. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.  
Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna. (SIPKD dan SIMDA BMD)

Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	<p><b>Strategi Kd I :</b> Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</p>	<p><b>Strategi Kd II :</b> Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman</p>
	K E L E M A H A N	<p><b>Strategi Kd III :</b> Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang</p>	<p><b>Strategi Kd IV :</b> Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman</p>

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:



BPKAD.		
<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM masih belum memadai;</li> <li>2. Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Aset Daerah;</li> <li>3. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi antara Pengelolaan Keuangan dan Aset.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu Adanya Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah;</li> <li>2. Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program-program Pelatihan dan Sertifikasi.</li> </ol>

Penentuan strategi- strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksanannya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BPKAD Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan pelaporan keuangan aset daerah yang lebih baik;
2. Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan;
3. Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.

#### **Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diterapkan oleh Badan BPKAD Kabupaten Sumedang adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
3. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pelatihan dan sertifikasi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2022, pada Program/Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulaidari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja yang dilaksanakanoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.



Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Sumedang

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Sumedang	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	95%	924.415.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Sumedang	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	95%	1.450.000.000	
			Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%	1.370.018.000			Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%	2.230.000.000	
			Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	95%	1.183.648.000			Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	95%	2.500.000.000	
			Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95%	959.783.950			Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95%	2.600.000.000	
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Sumedang	Dokumen pengendalian Anggaran	12 Dokumen	924.415.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Sumedang	Dokumen pengendalian Anggaran	12 Dokumen	1.450.000.000	
			Dokumen Perencanaan Penganggaran	6 Dokumen	1.370.018.000			Dokumen Perencanaan Penganggaran	6 Dokumen	2.230.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	206.375.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	275.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dokumen	155.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dokumen	275.000.000,00	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi RKA SKPD	55 SKPD	131.830.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi RKA SKPD	55 SKPD	175.000.000,00	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	55 SKPD	127.430.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	55 SKPD	200.000.000,00	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi DPA SKPD	55 SKPD	165.630.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi DPA SKPD	55 SKPD	180.000.000,00	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	55 SKPD	128.690.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	55 SKPD	175.000.000,00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen APBD	2 Dokumen	109.305.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen APBD	2 Dokumen	350.000.000,00	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	6 Dokumen	452.995.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	6 Dokumen	550.000.000,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	6 Dokumen	298.127.300	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	6 Dokumen	450.000.000,00	



Rancangan Awal RKP						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	2 Dokumen	96.353.350	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	2 Dokumen	150.000.000,00	
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	2 Dokumen	125.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	2 Dokumen	400.000.000,00	
12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Verifikasi, Pejabat Struktural BPKAD, Kasubag Program SKPD dan Operator Penganggaran SKPD	190 Orang	296.956.850	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Verifikasi, Pejabat Struktural BPKAD, Kasubag Program SKPD dan Operator Penganggaran SKPD	190 Orang	500.000.000,00	
II	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Kabupaten Sumedang</b>	<b>Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>1.183.648.000</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Kabupaten Sumedang</b>	<b>Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>2.500.000.000</b>	
13	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah buku kas umum daerah, dokumen perhitungan silpa	13 Dokumen	306.672.900	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah buku kas umum daerah, dokumen perhitungan silpa	13 Dokumen	500.000.000	
14	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi RAK Murni dan Perubahan, Jumlah prakiraan pengeluaran kas daerah dan jumlah penerbitan SPD	330 Dokumen	62.761.000	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Validasi RAK Murni dan Perubahan, Jumlah prakiraan pengeluaran kas daerah dan jumlah penerbitan SPD	330 Dokumen	350.000.000	
15	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kabupaten Sumedang	Jumlah laporan konfirmasi transfer, Jumlah laporan realisasi belanja dana spesifik, Jumlah pengajuan penyaluran/pencairan dana spesifik	4 Dokumen, 62 Dokumen, 84 Dokumen	92.144.600	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kabupaten Sumedang	Jumlah laporan konfirmasi transfer, Jumlah laporan realisasi belanja dana spesifik, Jumlah pengajuan penyaluran/pencairan dana spesifik	4 Dokumen, 62 Dokumen, 84 Dokumen	350.000.000	
16	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	Kabupaten Sumedang	Jumlah koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai	1 Dokumen	38.710.500	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	Kabupaten Sumedang	Jumlah koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai	1 Dokumen	250.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Kabupaten Sumedang	Jumlah laporan posisi kas harian, Jumlah laporan belanja gaji dan TPP, Jumlah laporan IWP, Jumlah laporan pemotongan TAPERA, Berita Acara Rekonsiliasi penyetoran pajak pusat	243 Dokumen, 12 Dokumen, 12 Dokumen, 10 Dokumen, 2 Dokumen	495.602.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Kabupaten Sumedang	Jumlah laporan posisi kas harian, Jumlah laporan belanja gaji dan TPP, Jumlah laporan IWP, Jumlah laporan pemotongan TAPERA, Berita Acara Rekonsiliasi penyetoran pajak pusat	243 Dokumen, 12 Dokumen, 12 Dokumen, 10 Dokumen, 2 Dokumen	400.000.000	
18	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Sumedang	Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	47.578.500	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Sumedang	Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	250.000.000	
19	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan	55 SKPD	140.178.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan	55 SKPD	400.000.000	
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	607.267.850	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.500.000.000	
			Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	2 Dokumen	352.516.100			Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	2 Dokumen	1.100.000.000	
20	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan	24 Buku	52.516.100	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan	24 Buku	150.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
21	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Sumedang	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	3 Jenis	75.799.500	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Sumedang	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	3 Jenis	250.000.000	
22	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	158 Buku	100.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	158 Buku	300.000.000	
23	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	2 Paket	100.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	2 Paket	350.000.000	
24	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perda LPP APBD Jumlah Perbub LPP APBD	4 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perda LPP APBD Jumlah Perbub LPP APBD	4 Dokumen	250.000.000	
25	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Tindak lanjut BPK	2 Dokumen	9.168.250	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Tindak lanjut BPK	2 Dokumen	50.000.000	
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR	4 Dokumen	56.737.200	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR	4 Dokumen	150.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
27	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Pemda	20 Buku	95.352.800	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Sumedang	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Pemda	20 Buku	150.000.000	
28	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagan Akun Standar	20 Buku	11.289.200	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagan Akun Standar	20 Buku	150.000.000	
29	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perbup Sisdur Akuntansi	10 Buku	200.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perbup Sisdur Akuntansi	10 Buku	50.000.000	
30	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	55 SKPD	56.491.500	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	55 SKPD	400.000.000	
31	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD	37 SKPD	40.938.500	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD	37 SKPD	100.000.000	
32	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Buku Profil Keuangan Daerah dan Buku Saku Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Paket	61.490.900	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Buku Profil Keuangan Daerah dan Buku Saku Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Paket	250.000.000	
IV	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Persentase ketersediaan data lingkup keuangan daerah	92%	68.574.050	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kabupaten Sumedang	Persentase ketersediaan data lingkup keuangan daerah	92%	100.000.000	
33	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Kabupaten Sumedang	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	1 Pemeliharaan Sistem	68.574.050	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Kabupaten Sumedang	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	1 Pemeliharaan Sistem	100.000.000	



Rancangan Awal RKP						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
B	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Kabupaten Sumedang	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89%	1.629.181.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Kabupaten Sumedang	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89%	2.379.250.000	
V	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Kabupaten Sumedang	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	1.629.181.000	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Kabupaten Sumedang	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	2.379.250.000	
34	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Sumedang	Jumlah SSH	1 Dokumen	350.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Sumedang	Jumlah SSH	1 Dokumen	525.000.000,00	
35	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Jumlah Standar Barang Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Jumlah Standar Barang Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	75.000.000,00	
36	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah RKBMD dan RKPMD	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah RKBMD dan RKPMD	2 Dokumen	30.000.000,00	
37	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	70.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	105.000.000,00	
38	Penatausahaan Barang Milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Data Belanja Modal , Jumlah Neraca Aset , Rekonsiliasi Aset, Pemeliharaan Aplikasi	55 SKPD, 2 Pemeliharaan	140.000.000	Penatausahaan Barang Milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Data Belanja Modal , Jumlah Neraca Aset , Rekonsiliasi Aset, Pemeliharaan Aplikasi	55 SKPD, 2 Pemeliharaan	210.000.000,00	
39	Inventarisasi barang Milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Inventarasi BMD	55 SKPD	50.000.000	Inventarisasi barang Milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Inventarasi BMD	55 SKPD	75.000.000,00	
40	Pengamanan Barang Milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah BMD yang diamankan	26 Plang Tanda batas	309.681.000	Pengamanan Barang Milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah BMD yang diamankan	26 Plang Tanda batas	400.000.000,00	
41	penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah BA Penilaian BMD	24 Berita Acara	155.000.000	penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah BA Penilaian BMD	24 Berita Acara	232.500.000,00	
42	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah BA Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan BMD	12 Berita Acara	79.500.000	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah BA Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan BMD	12 Berita Acara	119.250.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp,-)	
43	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Pemindahtanganan BMD, Jumlah Pemusnahan dan Penghapusan BMD	3 Dokumen	145.000.000	Optimaliasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Pemindahtanganan BMD, Jumlah Pemusnahan dan Penghapusan BMD	3 Dokumen	217.500.000,00	
44	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah BA ReKonsiliasi BMD	55 Berita Acara	100.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah BA ReKonsiliasi BMD	55 Berita Acara	150.000.000,00	
45	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Penetapan Stastus pengguna barang	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Kabupaten Sumedang	Jumlah Penetapan Stastus pengguna barang	2 Dokumen	30.000.000,00	
46	pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BMD	55 SKPD	140.000.000	pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Sumedang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BMD	55 SKPD	210.000.000,00	



## 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan, maka dalam proses perencanaan selain berdasarkan usulan dan kebutuhan SKPD, juga harus memperhatikan usulan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka proses penyusunan Dokumen Perencanaan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan musrenbang tingkat Kabupaten, sehingga diharapkan dalam aplikasi proses pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan yang ditetapkan tadi sesuai dan sinergis dengan aspirasi masyarakat.

Namun demikian semua usulan kegiatan BPKAD Tahun 2021, tidak ada satu pun usulan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat, sehingga semua usulan program/kegiatan berdasarkan usulan SKPD yang mengacu pada Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

**Tabel. 2.8**  
**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N	I	H	I	L

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 memiliki Tujuan "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)". Apabila ditelaah, Misi tersebut sesuai dengan sembilan program Nawa cita khususnya point ke 2 yaitu "Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan".

Selain itu, terdapat juga keterkaitan dengan Misi Provinsi Jawa Barat 2019-2023 khususnya Misi ke-5, yaitu "Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, dengan Sasaran Misi yaitu Birokrasi Juara, APBD Juara, ASN Juara dan BUMD Juara".

Dari hasil telaahan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan adanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset yang ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang profesional.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional**  
**Kabupaten Sumedang**

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>Nasional</b>		
1	Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergi. Peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/ daerah istimewa dalam pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.	RPJMN 2020-2024	



No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>B</b>	<b>Provinsi</b>		
1	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i> ; Meningkatkan Perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.	RPJMD Provinsi Jawa Barat 2020-2024	

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, maka perlu dijabarkan kembali menjadi sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Tujuan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu);
2. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*).

Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas internal perangkat daerah

### 3.3. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023*** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

**SEJAHTERA** Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat

dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

**AGAMIS** Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**MAJU** Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

**PROFESIONAL** *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

**KREATIF** masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan



menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **“Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat”** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan **Tujuan** yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagai berikut:

**" Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah yang Berkualitas"**

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan kiranya perlu dipahami upaya mencapai tujuan dan sasaran. Penjelasan Tujuan tersebut menggambarkan tata nilai yang mempunyai keeratan dengan mutu pelayanan. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mengandung arti sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Keuangan** mengandung arti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- b. **Berkualitas** mengandung arti mempunyai kualitas, bermutu (baik)
- c. **Akurat** mengandung arti setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- d. **Tepat Waktu** mengandung arti betul atau lurus sesuai waktu yang telah ditetapkan.



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sijedang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5																		
5	02																	
5	02	01																
5	02	01	2.01															
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		
<b>KEUANGAN</b>																		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									89,743,378,683						95,135,089,683			
<b>Perencanaan, Penyanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									83,607,758,683						83,975,839,683			
									345,000,000						405,000,000			
5	02	01	2.C1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	32 Dokumen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	130,000,000
5	02	01	2.C1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	32 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	30,000,000
5	02	01	2.C1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	32 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	30,000,000
5	02	01	2.C1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	32 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	30,000,000
5	02	01	2.C1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	32 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	30,000,000
5	02	01	2.C1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	32 Dokumen	145,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	155,000,000
5	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
									77,967,479,683									77,977,479,683
5	02	01	2.C2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Dokumen	77,792,479,683	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	77,792,479,683
5	02	01	2.C2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	185,000,000







**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan/ Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	187,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	190,000,000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Jenis	12 Bulan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	275,000,000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Surat Kabar	12 Bulan	36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	40,000,000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	63 Kali	12 Bulan	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	600,000,000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Arsip yang dikelola	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	60,000,000
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Website yang dipelihara	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	250,000,000
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>350,000,000</b>					<b>385,000,000</b>
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	2 Paket	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	110,000,000
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	2 Paket	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	275,000,000
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>2,283,960,000</b>					<b>2,311,000,000</b>



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah Jasa Pelayanan umum Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	706,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	711,000,000
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Pelayanan umum Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	12 Bulan	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	100,000,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan umum Kantor	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	12 Bulan	1,487,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	1,500,000,000
<b>5 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>661,755,000</b>					<b>730,000,000</b>
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 Kendaraan Dinas	100 persen	275,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	285,000,000
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	30,000,000
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 persen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	90,000,000
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	175,000,000
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	448 Unit	100 persen	131,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	100 %	150,000,000
<b>5 02 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								<b>4,506,439,000</b>					
<b>5 02 02 2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								<b>2,294,433,000</b>					<b>8,780,000,000</b>
														<b>3,580,000,000</b>



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.C1.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 Persen	206,375.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	275,000,000
5.02.02.2.C1.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 Persen	155,740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	275,000,000
5.02.02.2.C1.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Validasi RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 SKPD	100 Persen	131,830.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	175,000,000
5.02.02.2.C1.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 SKPD	100 Persen	127,430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	200,000,000
5.02.02.2.C1.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Validasi DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 SKPD	100 Persen	165,630.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	180,000,000
5.02.02.2.C1.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 SKPD	100 Persen	128,690.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	175,000,000
5.02.02.2.C1.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Dokumen APBD	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 Persen	109,305.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	350,000,000
5.02.02.2.C1.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 Persen	452,995.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	550,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.C1 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 Persen	298,127.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	450,000,000
5 02 02 2.C1 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 Persen	96,353.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	150,000,000
5 02 02 2.C1 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 Persen	125,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	400,000,000
5 02 02 2.C1 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Verifikasi, Kasubag Program SKPD, Operator Penganggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Pengendalian Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	190 Orang	100 Persen	296,956.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100 %	400,000,000
<b>5 02 02 2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>								<b>1,183,648,000</b>					<b>2,500,000,000</b>
5 02 02 2.C2 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Buku Kas Umum Daerah, Dokumen Perhitungan SILPA	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	13 Dokumen	100 Persen	306,672.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	97 %	500,000,000
5 02 02 2.C2 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Validasi RAK Murni dan Perubahan, Jumlah Perkiraan Pengeluaran Kas Daerah, dan Jumlah Penerbitan SPD	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	330 Dokumen	100 Persen	62,761.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	97 %	350,000,000
5 02 02 2.C2 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer, Jumlah Laporan Realisasi Belanja Dana Spesifik, Jumlah Pengajuan Penyaluran Pencairan dana Spesifik	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Dokumen	100 Persen	92,144.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	97 %	350,000,000
5 02 02 2.C2 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen	100 Persen	38,710.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	97 %	250,000,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian, Jumlah Laporan Belanja Gaji dan TFP, Jumlah Laporan IWP, Jumlah Laporan Pemotongan Tapera, Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 Dokumen	100 Persen	495,602.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	97 %	400.000.000
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen	100 Persen	47,578.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	97 %	250.000.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	55 SKPD	100 Persen	140,178.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	97 %	400.000.000
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>							<b>959,783,950</b>						<b>2,600,000,000</b>
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	24 Buku	100 Persen	52,516.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	150.000.000
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Jenis	100 Persen	75,799.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	250.000.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Laporan LRA Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	158 Buku	100 Persen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	300.000.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BIUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Paket	100 Persen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	350.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.C3.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Perda LPP APBD Jumlah Perbup LPP APBD	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Dokumen	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	250,000,000	
5.02.02.2.C3.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Laporan Tindak Lanjut BPK	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	100 Persen	9,168,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	50,000,000	
5.02.02.2.C3.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Dokumen	100 Persen	56,737,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	150,000,000	
5.02.02.2.C3.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Pememerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	20 Buku	100 Persen	95,352,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	150,000,000	
5.02.02.2.C3.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagan Akun Standar	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	20 Buku	100 Persen	11,289,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	150,000,000	
5.02.02.2.C3.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Perbup Sisdur Akuntansi	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Buku	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	50,000,000	
5.02.02.2.C3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	55 SKPD	100 Persen	56,491,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	400,000,000	
5.02.02.2.C3.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	37 Puskesmas Lab Dinkes	100 Persen	40,938,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	100,000,000	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Buku Profil Keuangan Daerah dan Buku Saku Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Paket	100 Persen	61,490.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	250,000,000
5 02 02 2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>								68,574,050					100,000,000
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	Laporan Keuangan Berbasis Akrual	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Pemeliharaan Sistem	100 Persen	68,574.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	97 %	100,000,000
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>								1,629,181,000					2,379,250,000
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>								1,629,181,000					2,379,250,000
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Satuan Standar Harga	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	100 Persen	350,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	525,000,000
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Jumlah Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen	100 Persen	50,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	75,000,000
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah RKBM dan RKPBM	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen	100 Persen	20,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	30,000,000
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4 Dokumen	100 Persen	70,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	105,000,000
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Data Belanja Modal, Jumlah Neraca Aset, Rekonsiliasi Aset dan Pemeliharaan Aplikasi	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	55 SKPD	100 Persen	140,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	210,000,000
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Inventarisasi BMD	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	55 SKPD	100 Persen	50,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	75,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan/ Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah BMD yang diamankan	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	26 Plang Tanda batas	100 Persen	309,681.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	400,000,000
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah BA Penilaian BMD	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	24 Berita Acara	100 Persen	155,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	232,500,000
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah BA Pengawasan Pengendalian dan Pengelolaan BMD	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Berita Acara	100 Persen	79,500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	119,250,000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Pemindahtanganan BMD Jumlah Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 Dokumen	100 Persen	145,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	217,500,000
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah BA Rekonsiliasi BMD	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	55 Berita Acara	100 Persen	100,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	150,000,000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Penetapan Status Pengguna Barang	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen	100 Persen	20,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	30,000,000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BMD	Tertibnya Aset Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	55 SKPD	100 Persen	140,000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	91 %	210,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>89,743,378,683</b>					<b>95,135,089,683</b>



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

#### 4.1. Rencana Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut:

##### A. Belanja Program pada setiap SKPD:

###### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

##### B. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### 4.2. Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dari Program diatas serta sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

##### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

##### B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

**C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Siemang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Laporan	77,792,479,683	Simua Kib/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Laporan	77,792,479,683	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Laporan	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD				12 Dokumen	245,000,000	Simua Kib/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Dokumen	185,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	paket Laporan		paket Laporan	1 paket 1 Laporan	<b>180,000,000</b>						1 paket 1 Laporan	<b>175,160,000</b>	
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	180,000,000	Simua Kib/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	1 Laporan	175,160,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Laporan		Dokumen Laporan Laporan	12 Dokumen 4 Laporan 12 Laporan	<b>649,000,000</b>						12 Dokumen 4 Laporan 12 Laporan	<b>467,200,000</b>	
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				110 Stel	165,000,000	Kib. Siemang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	110 Stel	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian				4 Laporan	65,000,000	Simua Kib/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	4 Laporan	70,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Siemang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 orang	419,000,000	Siemang Kib/Kota, Siemang Kecamatan, Siemang Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	100 orang	197,200,000	Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan Laporan Laporan Laporan Laporan		Bulan Laporan Laporan Laporan Laporan	12 Bulan 1 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	<b>2,262,020,500</b>						12 Bulan 1 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	<b>1,725,000,000</b>	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Laporan	300,000,000	Kib. Siemang, Siemang Kecamatan, Siemang Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	4 Laporan	250,000,000	Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 Laporan	155,500,000	Kib. Siemang, Siemang Kecamatan, Siemang Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	1 Laporan	60,000,000	Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Laporan	440,520,500	Kib. Siemang, Siemang Kecamatan, Siemang Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Laporan	190,000,000	Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12 Laporan	255,000,000	Siemang Kib/Kota, Siemang Kecamatan, Siemang Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Laporan	275,000,000	Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Laporan	36,000,000	Siemang Kib/Kota, Siemang Kecamatan, Siemang Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Laporan	40,000,000	Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Simeung  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	750,000,000	Kib. Simeung, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Laporan	600,000,000	Badan Penghalaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Laporan	25,000,000	Kib. Simeung, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	2 Laporan	60,000,000	Badan Penghalaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Laporan	300,000,000	Kib. Simeung, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	1 Laporan	250,000,000	Badan Penghalaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen Unit Unit		persen Unit Unit	100 persen 5 Unit 20 Unit	<b>520,000,000</b>						100 persen 5 Unit 20 Unit	<b>385,000,000</b>	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				5 Unit	230,000,000	Kib. Simeung, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	5 Unit	110,000,000	Badan Penghalaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				20 Unit	290,000,000	Kib. Simeung, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	20 Unit	275,000,000	Badan Penghalaan Keuangan dan Aset Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Siemang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Laporan persen		Laporan Laporan persen	3 Laporan 12 Laporan 100 persen	2,283,960,000					3 Laporan 12 Laporan 100 persen	2,311,000,000		
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	706,200,000	Kab. Siemang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Laporan	711,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Laporan	90,000,000	Kab. Siemang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	3 Laporan	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	1,487,760,000	Kab. Siemang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Laporan	1,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen Laporan Laporan Laporan		persen Laporan Laporan Laporan	100 persen 1 Laporan 5 Laporan 12 Laporan	906,306,050					100 persen 1 Laporan 5 Laporan 12 Laporan	930,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Laporan	301,306,050	Kib. Sumedang, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	12 Laporan	285,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Laporan Pemeliharaan Mebel				1 Laporan	25,000,000	Kib. Sumedang, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	1 Laporan	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Laporan	80,000,000	Simua Kib/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	1 Laporan	90,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Laporan	150,000,000	Simua Kib/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	1 Laporan	175,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Laporan	350,000,000	Kib. Sumedang, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur BPKAD	2 Laporan	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	% %		% %	100 % 95 %	<b>52,012,208,904</b>						100 % 95 %	<b>8,530,000,000</b>	
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Dokumen pengendalian Anggaran Dokumen Perencanaan Penganggaran	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	<b>2,918,305,700</b>						12 Dokumen 12 Dokumen	<b>3,580,000,000</b>	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS				2 Dokumen	256,395,000	Kib. Sumedang, Simua Kecamatan, Simua Kulurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	275,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Simedang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS				2 Dokumen	190,290,000	Kab. Simedang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	275,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Validasi RKA SKPD				1 Dokumen	218,730,000	Kab. Simedang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	175,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	133,630,000	Simua Kab/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Validasi DPA SKPD				1 Dokumen	203,860,000	Simua Kab/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	180,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	128,690,500	Simua Kab/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	175,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD				2 Dokumen	440,405,000	Kab. Simedang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD				6 Dokumen	452,995,000	Simua Kab/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	6 Dokumen	550,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan				4 Dokumen	375,000,000	Simua Kab/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	4 Dokumen	450,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan				1 Dokumen	96,353,350	Kiib. Sumedang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLU DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah				1 Dokumen	125,000,000	Simua Kiib/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLU DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Penganggaran Daerah				1 Laporan	296,956,850	Simua Kiib/Kota, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLU DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Laporan	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	<b>1,386,069,500</b>						12 Dokumen	<b>2,250,000,000</b>	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				2 Dokumen	400,000,000	Kiib. Sumedang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLU DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan Daerah	2 Dokumen	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Validasi RAK Murni, Perubahan dan Jumlah Perkiraan Pengeluaran Kas Daerah, dan Jumlah Penerbitan SPD				2 Dokumen	100,000,000	Kiib. Sumedang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLU DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan Daerah	2 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi Laporan Konfirmasi Transfer /rekonsiliasi dana spesifik dan penyaluran dana spesifik (DAU)				3 Dokumen	222,144,600	Kiib. Sumedang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLU DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan Daerah	3 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai				1 Dokumen	75,000,000	Kiib. Sumedang, Simua Kecamatan, Simua Kelurahan	PENDAPATAN /SLU DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan Daerah	1 Dokumen	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Simedang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan Daerah	2 Dokumen	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan				1 Laporan	288,924,900	Kab. Simedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan Daerah	1 Laporan	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	<b>1,237,482,200</b>						2 Dokumen 2 Dokumen	<b>2,600,000,000</b>	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan				2 Jenis	52,516,100	Kab. Simedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Jenis	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi				3 Jenis	75,799,500	Kab. Simedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	3 Jenis	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan LRA Bulanan Triwulanan dan Semesteran				1 Jenis	100,000,000	Kab. Simedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Jenis	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited				4 Dokumen	150,000,000	Kab. Simedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	4 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Simeung  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda LPP APBD dan Perbup LPP APBD				4 Dokumen	200,000,000	Kab. Simeung, Simeung Kecamatan, Simeung Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	4 Dokumen	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Tindak Lanjut BPK				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Simeung, Simeung Kecamatan, Simeung Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR				1 Dokumen	56,737,200	Kab. Simeung, Simeung Kecamatan, Simeung Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	125,000,000	Simeung Kab/Kota, Simeung Kecamatan, Simeung Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagan Akun Standar				2 Buku	50,000,000	Kab. Simeung, Simeung Kecamatan, Simeung Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Buku	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Sisdir Akuntansi				1 Buku	200,000,000	Kab. Simeung, Simeung Kecamatan, Simeung Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Buku	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi				1 Laporan	100,000,000	Kab. Simeung, Simeung Kecamatan, Simeung Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Laporan	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD				1 Laporan	40,938,500	Kab. Simeung, Simeung Kecamatan, Simeung Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Siemang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	61,490,900	Kab. Siemang, Siemua Kecamatan, Siemua Kulurahan	PENDAPATAN D/SU DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen	<b>46,401,777,454</b>						2 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen	<b>10,000,000,000</b>	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	0		PENDAPATAN D/SU DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	46,401,777,454	Kab. Siemang, Siemua Kecamatan, Siemua Kulurahan			Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Laporan	50,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil				4 Laporan	0	Kab. Siemang, Siemua Kecamatan, Siemua Kulurahan			Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	Persentase ketersediaan data lingkup keuangan daerah	Persen		Persen	92 Persen	<b>68,574,050</b>						92 Persen	<b>100,000,000</b>	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui				1 Pemeliharaan Sistem	68,574,050	Kab. Siemang, Siemua Kecamatan, Siemua Kulurahan	PENDAPATAN D/SU DAERAH		Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Pemeliharaan Sistem	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	%		%	90 %	<b>1,794,181,000</b>						90 %	<b>2,379,250,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Sijedang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen Dokumen		Persen Dokumen	90 Persen 26 Dokumen	1,794,181,000						90 Persen 26 Dokumen	2,379,250,000	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Satuan Standar Harga				1 Dokumen	350,000,000	Kab. Sijedang, Sijua Kecamatan, Sijua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	525,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Jumlah Standar Barang Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	75,000,000	Kab. Sijedang, Sijua Kecamatan, Sijua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBM				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Sijedang, Sijua Kecamatan, Sijua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	70,000,000	Kab. Sijedang, Sijua Kecamatan, Sijua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	4 Dokumen	105,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	200,000,000	Kab. Sijedang, Sijua Kecamatan, Sijua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	4 Dokumen	210,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi BMD				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Sijedang, Sijua Kecamatan, Sijua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan				1 Dokumen	309,681,000	Kab. Sijedang, Sijua Kecamatan, Sijua Kelurahan	PENDAPATAN /SLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BA Penilaian BMD				2 Dokumen	155,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	232,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Pengawasan Pengendalian dan Pengelolaan BMD				2 Dokumen	79,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	119,250,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan				3 Dokumen	145,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	3 Dokumen	217,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan BMD				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Penetapan Status Pengguna Barang				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD				1 Laporan	140,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Perangkat Daerah	1 Laporan	210,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>TOTAL</b>							<b>139,145,156,137</b>							<b>1,45,345,089,683</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang harus memiliki rencana kerja yang dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditopang oleh Sumber Daya Manusia yang profesional.

Sehubungan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018-2023. Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Sumedang dan dapat mempertahankan predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun tahun berikutnya.

Namun demikian keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat. Dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini, diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Rencana kerja tahun 2022 ini merupakan acuan khususnya bagi penyelenggara yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seluruh unsur penyelenggara program perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda sebagaimana tertuang dalam rencana kerja ini.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan



peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang di tahun mendatang.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya

Demikian, semoga Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat direalisasikan sesuai harapan yang diinginkan.

Sumedang, ... Agustus 2021

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Kepala,



II. INE INAJAH., MSE., M.Sc  
Pembina TK.I/ IV.b  
NIP. 19690315 199901 2 001